

BAB II

PERAN PBB DALAM KONFLIK INTERNASIONAL

PBB adalah organisasi Negara berdaulat, yang secara sukarela bergabung dengan PBB untuk bekerja bagi perdamaian dunia. Secara resmi terbentuk pada 24 Oktober 1945. Pada saat itu, ia memiliki 51 negara sebagai Anggota. Saat ini, 193 negara anggota PBB; yang terbaru untuk bergabung adalah Sudan Selatan pada bulan Juli 2011. PBB adalah forum, tempat pertemuan, untuk hampir semua negara di dunia. Ini menyediakan mereka dengan mekanisme untuk membantu menemukan solusi untuk sengketa atau masalah, dan bertindak pada hampir semua keprihatinan bagi kemanusiaan.

Meskipun kadang-kadang digambarkan sebagai "parlemen dari negara-negara", PBB bukanlah sebuah supra-Negara maupun pemerintah pemerintah. Ia tidak memiliki tentara juga tidak memberlakukan pajak. Hal ini tergantung pada kemauan politik dari anggotanya telah keputusannya dilaksanakan dan bergantung pada kontribusi dari anggotanya untuk melaksanakan kegiatannya. (PublicInquiries, 2013)

PBB memainkan peran sentral dalam mengurangi ketegangan internasional, mencegah konflik dan mengakhiri pertempuran sudah berjalan. Ini berkaitan dengan lingkungan kita, luar angkasa, dan dasar laut. Ia telah membantu menghapus banyak penyakit dan memperluas produksi pangan. Hal peduli dan melindungi pengungsi, memperluas melek huruf dan merespon dengan cepat terhadap bencana alam. Hal ini juga melindungi dan mempromosikan hak-hak

individu dengan menetapkan standar global untuk hak asasi manusia. (PublicInquiries, 2013)

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah alat konstitutif PBB, menetapkan hak dan kewajiban dari negara anggota, dan membangun dengan organ-organ utama dan prosedur. Perjanjian internasional, Piagam codifies prinsip dasar hubungan internasional — dari kesetaraan berdaulat hingga larangan penggunaan kekuatan dalam setiap cara yang tidak sesuai dengan tujuan dari PBB.

Piagam terdiri dari Pembukaan dan 111 artikel dikelompokkan ke dalam 19 bab. Dari jumlah tersebut, Bab 1 menetapkan tujuan dan prinsip PBB; Bab 2 menetapkan kriteria untuk keanggotaan PBB; Bab 3 nama enam organ utama PBB; Bab 4-15 menentukan fungsi dan kekuatan organ-organ ini; Bab 16-17 berhubungan PBB untuk hukum internasional yang masih ada; dan Bab 18-19 menentukan perubahan dan ratifikasi Piagam. (DepartmentofPublicInformation, Basic Facts about the United Nations revised ed., 2011, hal. 3)

A. Struktur PBB

Piagam menetapkan enam organ utama PBB yaitu: Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional Hukum dan Sekretariat. Keluarga PBB, bagaimanapun, adalah jauh lebih besar, meliputi 15 badan-badan khusus dan berbagai program dan dana serta entitas lain. (DepartmentofPublicInformation, Basic Facts about the United Nations revised ed., 2011, hal. 5)

1. Majelis Umum

Majelis Umum adalah organ deliberatif utama PBB terdiri dari semua Negara Anggota, yang masing-masing memiliki satu suara, tidak peduli ukuran atau pengaruh. Mungkin mendiskusikan masalah yang timbul di bawah Piagam PBB. Keputusan tentang perdamaian dan keamanan internasional, mengakui Serikat baru Anggota dan anggaran PBB diputuskan oleh mayoritas dua-pertiga. Hal-hal lain yang diputuskan oleh mayoritas sederhana. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya khusus telah dilakukan untuk mencapai keputusan melalui konsensus, bukan suara formal. resolusi Majelis Umum hanya rekomendasi kepada Negara Anggota, tapi karena mereka mewakili mayoritas pandangan dunia, mereka membawa beban moral yang berat dan sering menyebabkan negara-negara untuk bergabung perjanjian internasional yang disebut perjanjian, konvensi, dan protokol, dll, dan, pada akhirnya, memiliki pengaruh positif di dunia. (PublicInquiries, 2013, hal. 2)

2. Dewan Keamanan

Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab utama di bawah Piagam PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Tidak seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan tidak mengadakan pertemuan rutin. Hal ini dapat diadakan setiap waktu, setiap kali perdamaian internasional terancam. Bahkan, itu memenuhi hampir setiap hari.

Negara anggota diwajibkan untuk melaksanakan keputusan tersebut, yang mengikat secara hukum. Ketika ancaman bagi perdamaian dibawa ke Dewan, biasanya pertama meminta para pihak untuk mencapai kesepakatan dengan cara

damai. Jika pertempuran pecah, namun, Dewan mencoba untuk mengamankan gencatan senjata melalui negosiasi, pembentukan sanksi, atau dengan otorisasi penggunaan kekuatan, yang dilakukan oleh negara-negara anggota bersedia. Dewan juga dapat memutuskan untuk mendirikan operasi penjaga perdamaian untuk mempromosikan perdamaian abadi.

Dewan memiliki 15 anggota, termasuk 5 anggota tetap: China, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. Pada akhir Perang Dunia II, lima negara tersebut memainkan peran kunci dalam pembentukan PBB. Pencipta Piagam PBB dikandung bahwa mereka akan terus memainkan peran penting dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. 10 anggota berputar lainnya dipilih oleh Majelis Umum atas dasar perwakilan geografis untuk istilah dua tahun.

Untuk lulus resolusi di Dewan Keamanan, 9 dari 15 anggota Dewan harus memilih "ya", tetapi jika salah satu dari 5 anggota tetap memberikan suara "tidak" - sering disebut sebagai hak veto - resolusi tidak lulus. Dewan juga membuat rekomendasi kepada Majelis Umum pada pengangkatan Sekretaris Jenderal baru dan pada penerimaan anggota baru untuk PBB. Banyak negara ingin memperluas keanggotaan Dewan untuk memasukkan anggota tetap dan tidak tetap baru. Proposal ini saat ini sedang dibahas oleh Negara Anggota PBB. (PublicInquiries, 2013, hal. 3)

3. Dewan Sosial dan Ekonomi

Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) adalah badan pusat untuk mengkoordinasikan pekerjaan ekonomi dan sosial PBB dan Sistem PBB.

Sebanyak 70 persen dari pekerjaan sistem PBB dikhususkan untuk mempromosikan standar hidup yang lebih tinggi, pekerjaan penuh, dan kondisi kemajuan dan pembangunan ekonomi dan sosial. Dewan merekomendasikan dan mengarahkan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari negara-negara berkembang, mendukung hak asasi manusia dan membina kerjasama dunia untuk memerangi kemiskinan dan keterbelakangan.

Untuk memenuhi kebutuhan spesifik, Majelis Umum telah menyiapkan sejumlah lembaga khusus seperti Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pendidikan PBB, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO), dan program-program seperti sebagai Program Pembangunan PBB (UNDP), Dana Anak PBB (UNICEF) dan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR). Kerja badan-badan dan program dikoordinasi oleh ECOSOC. (PublicInquiries, 2013, hal. 3)

4. Dewan Perwalian

Dewan Perwalian ditugaskan di bawah Piagam PBB untuk mengawasi administrasi 11 Kepercayaan Teritorial-bekas koloni atau wilayah-yang tergantung ditempatkan di bawah Perwalian Sistem Internasional. Sistem ini diciptakan pada akhir Perang Dunia II untuk mempromosikan kemajuan penduduk yang Teritorial tergantung dan pengembangan progresif mereka terhadap pemerintahan sendiri atau kemerdekaan.

Sejak penciptaan Dewan Perwalian, lebih dari 70 Teritorial kolonial, termasuk semua 11 Kepercayaan Territories, telah mencapai kemerdekaan dengan bantuan PBB. Yang terakhir Kepercayaan Wilayah untuk menjadi mandiri adalah

Palau pada tahun 1994, dan, sebagai hasilnya, Dewan memutuskan secara resmi untuk menanggukkan operasinya dan untuk memenuhi sebagai dan ketika kesempatan mungkin memerlukan.

Dewan Perwalian terdiri dari anggota tetap Dewan Keamanan-Cina, Prancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat. Setiap anggota memiliki satu suara, dan keputusan dibuat oleh mayoritas sederhana. (PublicInquiries, 2013, hal. 4)

5. International Court of Justice

The International Court of Justice (ICJ) adalah organ peradilan utama PBB, terletak di Den Haag, Belanda. Didirikan pada tahun 1945, ICJ, atau "World Court" diasumsikan fungsinya pada tahun 1946.

Pengadilan memutuskan sengketa hukum hanya antara bangsa-bangsa, bukan antara individu, sesuai dengan hukum internasional. Jika suatu negara tidak ingin mengambil bagian dalam persidangan, itu tidak harus melakukannya, kecuali diwajibkan oleh ketentuan-ketentuan perjanjian khusus. Setelah sebuah negara menerima yurisdiksi Pengadilan, itu harus mematuhi keputusan.

Sejak tahun 1946, Mahkamah Internasional telah dianggap lebih dari 150 kasus dan mengeluarkan sejumlah penilaian tentang sengketa internasional dibawa ke sana oleh negara-negara yang melibatkan hak-hak ekonomi, perlindungan lingkungan, hak lintas, non-penggunaan kekuatan, non-campur tangan dalam urusan internal yang negara, hubungan diplomatik, penyanderaan, hak suaka dan kebangsaan. (PublicInquiries, 2013, hal. 5)

6. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari staf internasional yang bekerja di Markas Besar PBB di New York, serta kantor-kantor PBB di Jenewa, Wina, Nairobi dan lokasi lainnya. Ini terdiri dari departemen dan kantor dengan staf total 16.000 diambil dari sebagian negara anggota. Mereka melaksanakan hari-hari kerja Organisasi. Tugas mereka adalah sebagai beragam seperti masalah ditangani oleh PBB. Ini berkisar dari administrasi operasi penjaga perdamaian, mediasi sengketa internasional, survei tren sosial dan ekonomi, meletakkan dasar bagi perjanjian internasional untuk mengorganisir konferensi internasional.

Sekretariat bertanggung jawab untuk melayani organ-organ lain dari PBB dan pengelolaan program-program dan kebijakan yang ditetapkan oleh mereka. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, yang ditunjuk oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan untuk jangka 5 tahun dan bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan yang diambil oleh berbagai organ PBB. Sebagai kepala petugas administrasi Organisasi, Sekretaris Jenderal mengarahkan pekerjaan staf yang dikenal sebagai "pegawai sipil internasional".

Tidak seperti diplomat, yang mewakili negara tertentu dan kepentingannya, pekerjaan pegawai internasional untuk semua 193 negara anggota dan mengambil pesanan mereka tidak dari pemerintah, tapi dari Sekretaris Jenderal. Mereka adalah independen dari bentuk-bentuk politik dan lain dari gangguan dan menempatkan kepentingan Organisasi di atas mereka sendiri.

Sekretaris Jenderal dapat membawa kepada perhatian Dewan Keamanan setiap masalah yang, menurut pendapatnya, bisa mengancam perdamaian dan

keamanan internasional. Dia bisa menggunakan "jasa baik" untuk mencegah konflik atau mempromosikan pemukiman damai sengketa antar negara. Sekretaris Jenderal juga dapat bertindak atas inisiatif sendiri untuk menangani masalah kemanusiaan atau lainnya dari kepentingan khusus.

Ada delapan Sekretaris Jenderal sejak berdirinya PBB: Trygve Lie (Norwegia), 1946-1952; Dag Hammarskjöld (Swedia), 1953-1961; U Thant (Burma, sekarang Myanmar), 1961-1971; Kurt Waldheim (Austria), 1972-1981; Javier Pérez de Cuéllar (Peru), 1982-1991; Boutros Boutros-Ghali (Mesir), 1992-1996; Kofi Annan (Ghana), 1997-2006; dan Ban Ki-moon (Republik Korea), 2007-sekarang. (PublicInquiries, 2013, hal. 6)

B. Tujuan dan Prinsip PBB

Sebagaimana diatur dalam Piagam, tujuan PBB adalah (DepartmentofPublicInformation, Basic Facts about the United Nations revised ed., 2011, hal. 4):

- a. untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional;
- b. untuk mengembangkan hubungan persahabatan antara negara-negara berdasarkan pada penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri dari bangsa;
- c. untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan internasional dan dalam mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar;

- d. menjadi pusat harmonisasi tindakan negara dalam mencapai tujuan-tujuan yang umum.

Pada gilirannya, PBB bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip berikut:

- a. Hal ini didasarkan pada kesetaraan kedaulatan semua anggotanya;
- b. Semua anggota harus memenuhi dengan itikad baik kewajiban Charter mereka;
- c. Mereka untuk menyelesaikan sengketa internasional mereka dengan cara damai dan tanpa membahayakan perdamaian dan keamanan dan keadilan internasional;
- d. Mereka harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap negara lain;

C. Mekanisme Penyelesaian Konflik Internasional PBB

1. Struktur PBB dalam menangani konflik

Salah satu tujuan utama dari PBB adalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Sejak pembentukannya, PBB telah sering dipanggil untuk mencegah perselisihan tidak tumbuh ke dalam perang, untuk membujuk pihak menentang untuk menggunakan meja rapat daripada kekuatan senjata, atau untuk membantu memulihkan perdamaian saat konflik bersenjata tidak pecah. Selama beberapa dekade, PBB telah membantu banyak konflik akhir, seringkali melalui tindakan Dewan Keamanan-organ utama untuk menangani isu-isu perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan, Majelis Umum dan Sekretaris Jenderal, namun, semua bermain, peran pelengkap utama dalam

membina perdamaian dan keamanan. kegiatan PBB mencakup bidang-bidang utama pencegahan konflik, *peacemaking*, *peacekeeping*, penegakan dan *peacebuilding*. jenis keterlibatan harus tumpang tindih atau terjadi secara simultan jika mereka menjadi efektif. (Department of Public Information, Basic Facts about the United Nations revised ed., 2011, hal. 59)

a. Dewan Keamanan

Piagam PBB mewajibkan negara-negara anggota untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai, dengan mempertimbangkan perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan tidak terancam. Mereka harus menahan diri dari tindakan mengancam atau penggunaan kekuatan terhadap setiap negara, dan dapat membawa sengketa kepada Dewan Keamanan: organ PBB dengan tanggung jawab utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Di bawah Piagam, negara anggota berkewajiban untuk menerima dan melaksanakan keputusan tersebut. Rekomendasi dari badan-badan lain PBB tidak memiliki kekuatan wajibkan seperti pada keputusan Dewan Keamanan, tetapi dapat mempengaruhi situasi dengan mengungkapkan pendapat dari masyarakat internasional. (Department of Public Information, Basic Facts about the United Nations revised ed., 2011, hal. 60)

Ketika perselisihan dibawa ke perhatiannya, Dewan biasanya mendesak para pihak untuk menyelesaikan dengan cara damai. Dewan dapat membuat rekomendasi kepada pihak untuk penyelesaian damai, menunjuk wakil khusus, meminta Sekretaris Jenderal untuk menggunakan *jasa-jasa baik*, dan melakukan investigasi dan mediasi. Ketika sengketa mengarah ke pertempuran, Dewan

berusaha untuk membawanya berakhir secepat mungkin. Seringkali Dewan telah mengeluarkan arahan gencatan senjata yang telah berperan dalam mencegah permusuhan yang lebih luas. Dalam mendukung proses perdamaian, Dewan dapat menyebarkan pengamat militer atau pasukan penjaga perdamaian ke wilayah konflik.

Di bawah Bab VII Piagam PBB, Dewan diberdayakan untuk mengambil langkah-langkah guna menjalankan keputusan-keputusannya. Keputusan ini dapat berupa memberlakukan embargo dan sanksi, atau mengizinkan penggunaan kekuatan untuk memastikan bahwa mandat terpenuhi. Dalam beberapa kasus, Dewan dapat secara resmi menggunakan kekuatan militer dari koalisi negara-negara anggota atau oleh organisasi regional atau melalui perjanjian. Namun, Dewan hanya mengambil tindakan tersebut apabila dianggap sebagai pilihan terakhir, jika cara-cara damai untuk menyelesaikan sengketa telah habis, dan setelah menentukan bahwa ancaman bagi perdamaian, pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi benar-benar ada.

Banyak dari penerjuanan *peacekeeping operation* yang baru, telah disahkan oleh Dewan dengan cara ini, yang berarti bahwa pasukan penjaga perdamaian dapat menggunakan kekuatan jika diperlukan untuk melaksanakan mandat mereka. Juga di bawah Bab VII Piagam PBB, Dewan telah membentuk pengadilan internasional untuk mengadili mereka yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran serius hukum kemanusiaan internasional, termasuk genosida. (Department of Public Information, Basic Facts about the United Nations revised ed., 2011, hal. 61)

b. Majelis Umum

Pasal 11 dari Piagam PBB memberdayakan Majelis Umum untuk "mempertimbangkan prinsip-prinsip umum kerjasama dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional" dan "membuat rekomendasi ... kepada Anggota atau kepada Dewan Keamanan atau keduanya". Majelis menawarkan cara untuk menemukan konsensus tentang isu-isu yang sulit, menyediakan forum untuk pembahasan keluhan dan pertukaran diplomatik.

Untuk mendorong pemeliharaan perdamaian, Majelis dapat mengadakan sesi khusus atau sesi khusus darurat pada isu-isu seperti perlucutan senjata, pembahasan Palestina dan pembahasan situasi di Afghanistan. Majelis Umum menganggap masalah perdamaian dan keamanan di Komite Pertama nya (Perlucutan Senjata dan Keamanan Internasional) dan Komite Keempat nya (Politik Khusus dan Dekolonisasi). Selama bertahun-tahun, Majelis telah membantu mempromosikan hubungan damai antara negara-negara dengan mengadopsi deklarasi perdamaian, penyelesaian damai sengketa dan kerjasama internasional. (Department of Public Information, Basic Facts about the United Nations revised ed., 2011, hal. 63)

2. Tindakan PBB dalam menangani konflik

a. Conflict prevention

Strategi utama untuk mencegah perselisihan tidak tumbuh ke dalam konflik, dan untuk mencegah kekambuhan konflik, adalah preventive diplomacy dan preventive disarmament.

Preventive diplomacy mengacu pada tindakan yang diambil untuk mencegah perselisihan dari yang timbul atau dari meningkat menjadi konflik, dan untuk membatasi penyebaran konflik ketika mereka terjadi. Ini dapat berupa mediasi, konsiliasi atau negosiasi. Peringatan dini merupakan komponen penting dari pencegahan, dan PBB hati-hati memantau perkembangan di seluruh dunia untuk mendeteksi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, sehingga memungkinkan Dewan Keamanan dan Sekretaris Jenderal untuk melaksanakan tindakan preventif. Utusan dan perwakilan khusus Sekretaris Jenderal terlibat dalam mediasi dan preventive diplomacy di seluruh dunia. Di beberapa tempat yang sulit, Kehadiran utusan yang terampil dapat mencegah eskalasi dari ketegangan. Pekerjaan ini sering dilakukan bekerjasama dengan organisasi regional.

Melengkapi diplomasi preventif adalah preventive disarmament, yang berusaha untuk mengurangi jumlah senjata di daerah rawan konflik. Di El Salvador, Liberia, Sierra Leone, Timor-Leste dan di tempat lain, ini telah mensyaratkan demobilisasi pasukan tempur, serta mengumpulkan dan menghancurkan senjata mereka sebagai bagian dari kesepakatan damai secara keseluruhan. Menghancurkan senjata kemarin mencegah keberadaan mereka digunakan dalam perang besok.

Sekretaris Jenderal memainkan peran sentral dalam penciptaan perdamaian, baik secara pribadi dan dengan mengirimkan utusan khusus atau misi untuk tugas-tugas tertentu, seperti negosiasi atau pencari fakta. Di bawah Piagam, Sekretaris Jenderal dapat membawa kepada perhatian Dewan Keamanan setiap masalah yang mungkin mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan

internasional. (Department of Public Information, Basic Facts about the United Nations revised ed., 2011, hal. 62)

a. *Peacekeeping Operation* PBB

Meskipun tidak disebutkan dengan jelas dalam Piagam PBB, operasi penjaga perdamaian PBB adalah alat penting yang digunakan oleh masyarakat internasional untuk memajukan perdamaian dan keamanan. Operasi penjaga perdamaian dikerahkan dengan otorisasi dari Dewan Keamanan dan persetujuan dari pemerintah tuan rumah dan/atau pihak-pihak utama yang terlibat dalam konflik. *Peacekeeping Operation* secara tradisional, melibatkan model terutama unsur militer untuk mengamati gencatan senjata dan pemisahan pasukan setelah perang antar negara. Hari ini, hal tersebut telah berkembang menjadi sebuah model yang kompleks melebihi unsur-militer, yang mana polisi dan warga sipil juga turut bekerja sama untuk membantu meletakkan dasar dari perdamaian yang berkelanjutan. (Department of Public Information, Basic Facts about the United Nations revised ed., 2011, hal. 63)

Dalam beberapa tahun terakhir, Dewan telah memperkenalkan praktek menerapkan ketentuan penegakan hukum di Bab VII Piagam PBB dalam otorisasi pengiriman operasi penjaga perdamaian, serta didalam mandat mereka dalam melakukan tugas-tugas yang mungkin memerlukan penggunaan kekuatan-seperti perlindungan warga sipil di bawah ancaman kekerasan fisik. Secara tradisional, pasukan penjaga perdamaian PBB hanya dapat menggunakan senjata mereka untuk membela diri, tapi mandat lebih 'kuat' di bawah Bab VII memungkinkan mereka untuk menggunakan kekuatan, misalnya, untuk melindungi warga sipil.

Personil militer operasi penjaga perdamaian secara sukarela disediakan oleh negara-negara anggota dan dibiayai oleh negara-negara anggota, yang dinilai di bawah anggaran pemeliharaan perdamaian PBB. Negara yang berkontribusi dalam pengiriman pasukan, mendapatkan kompensasi pada tingkat standar dari yang budget yang ada. Hal tersebut menciptakan skema 'berbagi beban' pada seluruh dunia sehingga dapat menawarkan efisiensi yang luar biasa pada manusia, keuangan dan istilah politik.

Operasi PBB, karena universalitas mereka, menawarkan legitimasi yang unik sebagai sarana mengatasi konflik. Universalitas mereka menambah legitimasi mereka dan membatasi implikasi untuk melanggar kedaulatan negara tuan rumah. Pasukan penjaga perdamaian dari luar konflik dapat menumbuhkan diskusi antar pihak yang bertikai sambil memfokuskan perhatian global pada isu-isu lokal. Prasyarat untuk keberhasilan operasi adalah adanya keinginan yang tulus dari kedua belah pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan perbedaan mereka secara damai, mandat penjaga perdamaian yang jelas, dukungan politik yang kuat oleh masyarakat internasional, dan penyediaan sumber daya keuangan dan manusia yang diperlukan untuk mencapai tujuan operasi ini. Yang paling penting, penjagaan perdamaian harus menemani proses politik; seharusnya tidak dan tidak dapat menggantikannya.

Masyarakat internasional telah menarik pelajaran dari operasi masa lalu dan bekerja untuk memperkuat PBB kapasitas penjaga perdamaian di sejumlah daerah. Sebuah cetak biru reformasi disediakan oleh 2.000 laporan dari Panel Sekretaris Jenderal pada Operasi Perdamaian, yang bertujuan untuk memungkinkan meluncurkan satu misi perdamaian multidisiplin baru per tahun.

Akibatnya, pada tahun 2010 terjadi perluasan dari 11 operasi penjaga perdamaian, serta dari sejumlah misi politik khusus, termasuk di Afghanistan dan Irak. (Department of Public Information, Basic Facts about the United Nations revised ed., 2011, hal. 64-65)

Atas anjuran Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon, restrukturisasi besar dari aparat penjaga perdamaian PBB berlangsung pada tahun 2007, melalui penciptaan *Department of Field Support (DFS)*. Sementara *Department of Peacekeeping Operation (DPKO)* dan *Department of Political Affairs (DPA)* memberikan arah politik dan eksekutif, masing-masing, untuk operasi penjaga perdamaian dan misi politik dan peacebuilding khusus, DFS memberikan dukungan khusus dan bimbingan untuk semua operasi lapangan perdamaian PBB di bidang keuangan, logistik, informasi, komunikasi dan teknologi, sumber daya manusia dan administrasi umum. Pada tahun 2009, DPKO dan DFS meluncurkan 'New Horizon' proses yang dirancang untuk menilai kebijakan dan strategi dilema besar yang dihadapi penjaga perdamaian PBB dan untuk menghidupkan kembali dialog dengan para pemangku kepentingan pada solusi yang mungkin, sehingga penjaga perdamaian PBB dapat memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan. (Department of Public Information, Basic Facts about the United Nations revised ed., 2011, hal. 66)

b. Peacemaking

Peacemaking mengacu pada penggunaan cara diplomatik untuk membujuk pihak dalam konflik untuk menghentikan permusuhan dan merundingkan penyelesaian damai sengketa. PBB melakukan berbagai cara agar konflik dapat

diselesaikan, dan akar penyebab mereka ditangani. Dewan Keamanan dapat merekomendasikan cara-cara untuk menyelesaikan sengketa atau meminta Sekretaris Jenderal untuk melakukan mediasi. Sekretaris Jenderal dapat mengambil inisiatif diplomatik untuk mendorong dan menjaga momentum negosiasi.

Sekretaris Jenderal memainkan peran sentral dalam penciptaan perdamaian, baik secara pribadi dan dengan mengirimkan utusan khusus atau misi untuk tugas-tugas tertentu, seperti negosiasi atau pencari fakta. Di bawah Piagam, Sekretaris Jenderal dapat membawa kepada perhatian Dewan Keamanan setiap masalah yang mungkin mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Untuk membantu menyelesaikan sengketa, Sekretaris Jenderal dapat menggunakan mediasi "jasa baik" atau menggunakan diplomasi preventif. Ketidakberpihakan Sekretaris Jenderal adalah salah satu aset utama PBB. Dalam banyak kasus, Sekretaris Jenderal memiliki peran untuk mencegah ancaman terhadap perdamaian atau dalam mengamankan kesepakatan damai.

Misalnya, tindakan oleh Sekretaris Jenderal dan utusannya untuk membantu menyelesaikan konflik, pada tahun 1996, pada konflik sipil 36 tahun di Guatemala. Di Republik Demokratik Kongo, Sekretaris Jenderal dan utusannya untuk membantu menegosiasikan 2003 perjanjian yang mengakhiri negara sipil. Kasus seperti Tajikistan, El Salvador, Mozambik dan Namibia mencerminkan banyak yang berbeda bagaimana Sekretaris Jenderal menjadi terlibat sebagai pembawa damai. Baru-baru ini, Sekretaris Jenderal telah memainkan peran kunci dalam upaya untuk menyelesaikan konflik di Darfur, di Sudan, dan pembentukan misi penjaga perdamaian di sana. (Department of Public Information, 2008, hal. 75)

b. Peacebuilding

Untuk PBB, perdamaian adalah suatu usaha untuk membantu negara-negara dan wilayah di masa transisi dari perang untuk perdamaian, termasuk kegiatan dan program untuk mendukung dan memperkuat transisi ini. Sebuah proses perdamaian biasanya dimulai dengan penandatanganan perjanjian perdamaian dengan mantan pihak yang bertikai dan peran PBB dalam memfasilitasi pelaksanaannya. Ini mungkin termasuk melanjutkan peran diplomatik untuk PBB, untuk memastikan bahwa kesulitan diselesaikan melalui negosiasi daripada resor untuk senjata. Hal ini juga dapat mencakup berbagai jenis bantuan-seperti pengerahan pasukan penjaga perdamaian; repatriasi dan reintegrasi pengungsi; pemantau pemilu; dan perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi.

Peacebuilding melibatkan tindakan oleh berbagai organisasi dalam sistem PBB, termasuk Bank Dunia, komisi ekonomi regional, LSM dan kelompok masyarakat setempat. Peacebuilding telah memainkan peran penting dalam operasi PBB di Bosnia dan Herzegovina, Kamboja, El Salvador, Guatemala, Kosovo, Liberia dan Mozambik, serta baru-baru ini di Afghanistan, Burundi, Irak, Sierra Leone dan Timor-Leste. Contoh perdamaian antara negara memiliki Misi PBB di Ethiopia dan Eritrea. (Department of Public Information, 2011, hal. 69)

Peacebuilding Commission, yang mulai beroperasi pada tahun 2006, adalah badan penasehat antar pemerintah PBB yang didedikasikan untuk membantu negara-negara dalam transisi dari perang ke perdamaian abadi. Ini membawa bersama-sama semua pelaku terkait perdamaian, termasuk donor

internasional dan lembaga-lembaga keuangan, pemerintah, negara memberikan kontribusi pasukan dan perwakilan masyarakat sipil; mengusulkan strategi terpadu untuk pembangunan perdamaian pasca-konflik dan pemulihan; membantu untuk memastikan pembiayaan diprediksi untuk kegiatan pemulihan awal dan investasi keuangan yang berkelanjutan; memperpanjang periode perhatian oleh masyarakat internasional untuk pemulihan pasca-konflik; dan mengembangkan praktik terbaik pada isu-isu yang membutuhkan kerjasama antara pelaku dalam politik, militer, kemanusiaan dan pembangunan.

Resolusi bersamaan Majelis Umum dan Dewan Keamanan membentuk Komisi Peacebuilding juga disediakan untuk pembentukan Peacebuilding Fund dan Peacebuilding Support Office. Pada tahun 2010, posisi Wakil Khusus tentang Kekerasan Seksual dalam Konflik diciptakan, menyusul upaya selama satu dekade pada bagian dari Dewan Keamanan untuk mengatasi dan mengutuk semua tindakan kekerasan seksual yang dilakukan selama konflik bersenjata terhadap warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak .
(DepartmentofPublicInformation, 2011, hal. 60)

3. Pengiriman Pasukan Perdamaian di Sudan Selatan

Pada tanggal 8 Juli 2011, menindaklanjuti kemerdekaan Sudan Selatan, Dewan Keamanan memutuskan bahwa situasi di Sudan Selatan terus menimbulkan ancaman bagi perdamaian internasional dan keamanan di wilayah tersebut. Bertindak di bawah Bab VII Piagam PBB, Dewan Keamanan mendirikan UNMISS untuk periode awal dari satu tahun sejak 9 Juli 2011. Sekretaris Jenderal diminta untuk mentransfer fungsi tertentu yang dilakukan oleh UNMIS untuk misi

baru, UNMISS, bersama-sama dengan staf dan logistik yang yang dibutuhkan untuk misi baru, hingga 9 Juli 2011, dan untuk memulai likuidasi UNMIS. (SecurityCouncil, Resolution 1996 2011, 3) Pada tanggal 8 Agustus 2011, seperti yang diminta oleh Dewan Keamanan dalam resolusi 1996 tahun 2011, UNMISS dan Pemerintah Sudan Selatan menandatangani perjanjian Status of Force Agreement (SoFA) dalam menjamin kebebasan Misi ini bergerak di seluruh wilayah Sudan Selatan. (SecurityCouncil, Report of Secretary General South Sudan S/2011/678, 2011, hal. 7)

Sesuai dengan resolusi nomor 1996 tahun 2011 mandat UNMISS adalah untuk mendukung Pemerintah dalam konsolidasi perdamaian dan dengan demikian mendorong pembangunan negara jangka panjang dan pembangunan ekonomi; membantu Pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk pencegahan konflik, mitigasi, dan resolusi dan melindungi warga sipil; dan membantu pihak berwenang dalam mengembangkan kapasitas untuk memberikan keamanan, membangun supremasi hukum, dan memperkuat sektor keamanan dan keadilan di Sudan Selatan (SecurityCouncil, Resolution 1996 2011). Keputusan ini didasari asumsi bahwa UNMISS bekerjasama dengan pemerintah untuk mewujudkan peningkatan perlindungan sipil, dan penegakan hak asasi manusia (Stamnes, 2015).

Hilde Frafjord Johnson, ditunjuk sebagai perwakilan khusus Sekretaris Jendral untuk UNMISS. Hilde dan tim ahli kecil tiba tiba terlebih dahulu di Sudan Selatan pada 8 Juli 2011 untuk mempersiapkan pengiriman pasukan UNMISS pada 9 Juli. UNMISS memperoleh manfaat dari staf dan sumber daya yang berafiliasi dengan mantan pegawai UNMIS. Semenjak 31 Juli, lebih dari 2.000

anggota internasional dan nasional sipil staf, 203 pengamat militer PBB, 64 perwira staf dan 378 polisi PBB telah secara resmi dipindahkan dari Misi PBB di Sudan (UNMIS) untuk UNMISS. Hal ini dapat menunjang kinerja untuk menghadapi tantangan memulai operasi baru dengan kepemimpinan senior baru dan kebutuhan mendesak dalam mengambil perencanaan ke depan strategis dan operasional. (SecurityCouncil, Report of Secretary General South Sudan S/2011/678, 2011, hal. 1)

Menurut mandat, kekuatan awal UNMISS adalah hingga 7 000 personil militer, sampai dengan 900 personel polisi sipil dan komponen sipil yang sesuai. Dewan Keamanan juga mempertimbangkan bahwa situasi keamanan di Sudan Selatan akan cukup kondusif untuk memungkinkan pengurangan jumlah pasukan. Pada bagian menentukan kekuatan resmi dari komponen misi, Resolusi 1996 menyatakan bahwa dewan 'lanjut memutuskan untuk meninjau di tiga dan enam bulan apakah kondisi di lapangan dapat memungkinkan pengurangan personil militer ke level 6000'.

Krisis kekerasan yang terjadi di Sudan Selatan pada Desember 2013 mengakibatkan UNMISS mengambil langkah belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Kebutuhan mendesak untuk pasukan tambahan guna melindungi warga sipil dan membantu dalam pemberian bantuan kemanusiaan dijamin melalui kerjasama diamanatkan oleh Resolusi Dewan Keamanan 2132 pada 24 Desember. UNMISS diminta untuk meningkatkan pasukan UNMISS ke jumlah 12.500 personil dan komponen polisi ke jumlah 1.323 personel dengan prioritas mandat untuk perlindungan terhadap warga sipil. (Stamnes, 2015).

Tabel 2.1 Kekuatan Misi Perdamaian UNMISS pada 31 Desember 2013								
Awal	Tentara	Pengamat	Polisi	Sipil	Sipil	Volunteer	Total	Fatalities
Penerjunan		Militer		Internasional	Lokal		Personel	
July 2011	6,796	142	746	861	1,334	415	10,294	20

Data diolah dari Peace and Security Section of the United Nations Department of Public Information DPI/1634/Rev.152 dalam *FACT SHEET: 31 December 2013 United Nation Peacekeeping Operation*. Site: <http://www.un.org/en/peacekeeping/archive/2013/bnote1213.pdf>

Seperti tertera dalam tabel di atas, kekuatan UNMISS hingga 6 bulan setelah penerjunan belum mencapai kapasitas maksimalnya. Sejumlah 6.796 pasukan tersebut berasal dari 65 negara yang berasal dari seluruh belahan dunia. Proporsi mayoritas pasukan UNMISS bukan berasal dari negara pemegang hak veto. Jumlah penyumbang pasukan terbesar berasal dari India sejumlah 1.996 pasukan militer, Rwanda dengan 982 pasukan militer, dan diikuti Nepal dengan 859 pasukan militer. (un.org, peacekeeping contributors, 2013)